HISTORIOGRAFI DIGITAL DAN LAHIRNYA SEJARAH PUBLIK: SEBUAH KAJIAN KONSEPTUAL

Nasrun Madani Nst[1*], Etmi Hardi[2], Haldi Patra[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : nasrunmadani12@gmail.com

ABSTRACT

This piece examines how the practice of historiography has changed with the advent of digital technology, leading to the development of public history as a contemporary form of historical narrative. The study of historiography, which looks at how historical writing has evolved, is continually adapting; it responds to shifts in technology and the intellectual climate of various periods. The arrival of digital tools has revolutionized the ways history is documented, preserved, and made available to the general populace. This research utilizes a library-based methodology along with descriptive and analytical techniques, relying on existing historiographical texts and theoretical models. The results suggest that digital historiography does not pose a danger to scholarly historical writing; instead, it broadens the historiographical landscape and facilitates the democratization of historical accounts. Concurrently, public history that emerges from the digital space requires new responsibilities in terms of knowledge: ensuring accuracy of historical facts amidst the swift circulation of mostly unverified data. This article concludes by asserting that professional historians need to participate in the digital public history domain, not at the cost of their academic integrity, but by adapting their scholarly work into formats that are reachable for a wider audience.

Keywords : *Digital Historiography, Public History, Historical Writing, Digital Era, Democratization Of History.*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara konseptual perubahan historiografi di zaman digital serta munculnya sejarah publik sebagai bentuk baru penulisan sejarah di masa kini. Historiografi sebagai suatu bidang yang mempelajari evolusi penulisan sejarah tidak pernah statis; selalu beradaptasi mengikuti perubahan teknologi dan budaya intelektual di zamannya. Kehadiran teknologi digital telah memicu transformasi mendalam dalam cara sejarah ditulis, disimpan, dan disebarkan kepada publik. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis yang berlandaskan pada literatur historiografi dan kerangka konseptual yang sesuai. Temuan dari kajian mengindikasikan bahwa historiografi digital tidak menjadi ancaman bagi penulisan sejarah akademik, tetapi malah memperluas ruang lingkup historiografi dengan membawa demokratisasi dalam narasi sejarah. Di sisi lain, sejarah publik yang muncul dari platform digital menuntut tanggung jawab epistemologis baru, yaitu menjaga akurasi historis di tengah banyaknya informasi yang tidak selalu dapat diverifikasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa sejarawan akademis harus aktif terlibat dalam ekosistem sejarah publik digital, tanpa mengorbankan standar ilmiah, tetapi dengan mengadaptasikan standar tersebut ke bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kata Kunci : *Historiografi Digital, Sejarah Publik, Penulisan Sejarah, Era Digital, Demokratisasi Sejarah.*

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah senantiasa mengalami perubahan. Ia terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, struktur sosial, serta pemahaman intelektual masyarakat di setiap era. Mulai dari inskripsi pada batu, dokumen-dokumen tulisan tangan, buku-buku yang dicetak, hingga sekarang memasuki fase baru: era digital. Setiap perubahan medium ini bukan hanya sekadar modifikasi teknis, melainkan juga membawa perubahan paradigma yang mendetail dalam cara sejarah dihasilkan, disebarkan, dan diapresiasi oleh masyarakat. Memahami evolusi ini merupakan tanggung jawab penting bagi historiografi sebagai bidang studi yang secara khusus meneliti perkembangan dan dinamika penulisan sejarah sepanjang masa.

Mestika Zed (2001) menegaskan bahwa memahami historiografi sebenarnya adalah memahami "sejarah dari penulisan sejarah" yang merupakan usaha untuk melihat bagaimana setiap era menciptakan pola, pendekatan, dan tradisi penulisan sejarah yang unik. Dalam konteks ini, munculnya teknologi digital tidak hanya merupakan inovasi teknis yang tidak berkaitan dengan ilmu sejarah. Sebaliknya, ia merupakan fase baru yang sangat berarti dalam perjalanan panjang perkembangan historiografi manusia, karena ia secara radikal mengubah hampir semua aspek dari proses pembuatan dan penyebaran pengetahuan sejarah.

Era digital telah secara mendalam mengubah cara kita memahami historiografi. Dahulu, kekuasaan dalam penulisan sejarah hampir sepenuhnya dikuasai oleh sejarawan akademis yang terlatih dan lembaga negara yang memiliki pengakuan resmi, tetapi sekarang, siapa pun yang memiliki koneksi internet dan keterampilan digital yang memadai dapat membuat, menyebarluaskan, dan bahkan memengaruhi narasi sejarah yang beredar di masyarakat. Perubahan luar biasa ini telah menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai sejarah publik: suatu praktik penulisan, penyebaran, dan penggunaan sejarah di luar lingkungan akademik formal, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum sebagai produsen dan konsumen sekaligus.

Fenomena ini tidak muncul dalam keheningan. Sartono Kartodirdjo (1982) dalam karya pentingnya mengenai pemikiran dan evolusi historiografi Indonesia mengamati bahwa historiografi selalu mencerminkan kondisi sosial, politik, dan intelektual dari masyarakat yang menciptakannya. Dengan menerapkan kerangka pemikiran ini, munculnya historiografi digital dan sejarah publik dapat dilihat sebagai respons yang tak terhindarkan dari masyarakat informasi di abad ke-21 terhadap tuntutan akan sejarah yang lebih demokratis, lebih mudah diakses, dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Di Indonesia, perubahan ini semakin terasa dengan jelas. Banyak kanal YouTube yang mengangkat topik sejarah Indonesia dengan cara yang menarik, akun media sosial yang secara berkala membagikan informasi sejarah kepada jutaan orang, podcast sejarah yang semakin populer, serta komunitas penggemar sejarah yang aktif berbincang di berbagai platform digital, semuanya menunjukkan adanya dinamika sejarah publik di zaman digital. Konten-konten ini sering mampu menjangkau audiens yang jauh lebih besar daripada publikasi akademis manapun, sekaligus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai standar, otoritas, dan tanggung jawab dalam menulis serta menyebarluaskan cerita sejarah.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya dan menjadi fokus dari penelitian ini adalah: bagaimana pergeseran signifikan ini perlu dipahami dan ditempatkan dalam konteks ilmu historiografi? Apakah sejarah publik pada era digital ini menjadi ancaman serius bagi standar akademik penulisan sejarah yang telah dibentuk dengan usaha yang besar selama ratusan tahun, ataukah itu merupakan perluasan wilayah historiografi yang valid, penting, dan seharusnya

diterima dengan bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pendorong lahirnya kajian konseptual ini.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis gagasan historiografi digital sebagai tahap baru dalam evolusi penulisan sejarah; kedua, menjelaskan kemunculan sejarah publik sebagai fenomena historiografis dalam era digital yang memiliki ciri dan implikasi unik; dan ketiga, secara kritis mengidentifikasi kesempatan serta tantangan yang dihadirkan oleh historiografi digital terhadap perkembangan ilmu sejarah, khususnya di konteks Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman teoretis mengenai dinamika historiografi modern dan pentingnya bagi komunitas sejarawan di Indonesia.

Studi ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama ketika mempertimbangkan bahwa diskusi ilmiah tentang historiografi digital dan sejarah publik di Indonesia masih terbilang minim jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di negara-negara Barat. Sementara itu, penerapan sejarah publik secara digital tengah berkembang dengan cepat di kalangan masyarakat, namun perhatian terhadap refleksi teoretis serta konseptual mengenai fenomena ini dari perspektif historiografi masih tergolong kurang. Artikel ini dimaksudkan untuk menanggulangi kekurangan tersebut.

Kajian Teoritis

Historiografi sebagai studi yang mengeksplorasi evolusi penulisan sejarah sudah lama mengakui bahwa metode manusia dalam mencatat dan menyampaikan sejarah tidaklah konsisten dan selalu berubah. Breisach (1983) dalam buku mendalamnya tentang historiografi kuno, pertengahan, dan modern mengungkapkan bahwa setiap peradaban besar menciptakan tradisi penulisan sejarahnya sendiri, mencerminkan nilai-nilai, kepentingan, dan tingkat teknologi yang dimiliki. Tradisi sejarah Yunani kuno yang dipelopori oleh Herodotus dan Thucydides secara mendasar berbeda dari tradisi historiografi Islam yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun, yang juga berbeda dari historiografi positivis abad ke-19 yang dipimpin oleh Leopold von Ranke.

Dalam konteks Indonesia, Sartono Kartodirdjo (1982) mencatat bahwa evolusi historiografi beralih dari tradisi penulisan tradisional yang berfokus pada istana dan dipenuhi elemen mitos seperti dalam tradisi babad, hikayat, dan tambo menuju penulisan sejarah yang kritis berdasarkan metode ilmiah. Pergeseran ini tidak berlangsung tiba-tiba, tetapi melalui fase historiografi kolonial yang berpusat pada Eropa sebelum akhirnya menghasilkan historiografi nasional yang berfokus pada Indonesia pasca-kemerdekaan. Alfian et al. (1987) dalam buku mereka Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis secara jelas menjelaskan perjalanan panjang transformasi tersebut sebagai bagian dari proses kedewasaan intelektual masyarakat Indonesia.

Dengan munculnya era digital, transformasi historiografi kini memasuki periode yang jauh lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Iggers (1985) dalam tulisannya mengenai jalur-jalur baru historiografi Eropa telah meramalkan bahwa historiografi modern akan semakin beralih menuju pluralisme metodologis dan keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang. Apa yang mungkin tidak sepenuhnya diperkirakan oleh Iggers adalah betapa mendalamnya perubahan yang akan dihadirkan oleh revolusi digital: bukan hanya keberagaman dalam cara dan sudut pandang di dalam komunitas akademis, tetapi keberagaman yang jauh lebih mendasar, yaitu keberagaman dalam hal siapa yang dianggap berhak dan mampu menghasilkan pengetahuan sejarah. Robertson dan Mullen (2021) dalam kajian mereka tentang perkembangan sejarah digital mencatat bahwa pergeseran ini menandai lahirnya subdisiplin baru yang tidak hanya mengadopsi teknologi sebagai alat bantu, tetapi secara fundamental mengubah

cara sejarawan mengonsep, memproduksi, dan menyebarluaskan pengetahuan historis. Dougherty dan Nawrotzki (2013) lebih lanjut menunjukkan bahwa penulisan sejarah di era digital membuka ruang kolaborasi yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, memungkinkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan di luar komunitas akademis.

Kuntowijoyo (1994) menegaskan bahwa penulisan sejarah yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengaitkan fakta-fakta individual dengan struktur sosial yang lebih luas, melampaui sekadar penjelasan peristiwa menuju pemahaman tentang proses dan hubungan sebab-akibat historis. Permintaan metodologis ini menjadi salah satu titik ketegangan paling penting antara historiografi akademis dan historiografi digital: apakah konten sejarah digital, dengan segala keterbatasan format dan tekanan komersialnya, tetap dapat memenuhi kriteria analitis yang selama ini menjadi ciri khas historiografi ilmiah?

Soedjatmoko et al. (1995) dalam karya klasiknya mengenai historiografi Indonesia mencatat bahwa penulisan sejarah yang bertanggung jawab memerlukan penguasaan atas sumber, kejujuran intelektual, serta kesadaran mengenai posisi sejarawan dalam konteks sosial-politiknya. Prinsip-prinsip ini tetap relevan di zaman digital; bahkan dapat dikatakan semakin penting karena tekanan kontekstual yang dihadapi oleh pembuat konten sejarah digital—tekanan untuk menarik audiens besar, memproduksi konten dengan cepat, dan bersaing dalam ekosistem media yang semakin padat—sering kali bertentangan dengan tuntutan prinsip-prinsip tersebut.

Bambang Purwanto (2005) mengartikulasikan kritik tajam mengenai kecenderungan historiografi Indonesia untuk terlalu menekankan narasi nasional yang monolitik, sehingga mengabaikan keragaman pengalaman sejarah yang kaya di berbagai kelompok masyarakat. Dari sudut pandang ini, demokratisasi produksi sejarah yang ditimbulkan oleh era digital kontemporer memiliki potensi yang signifikan: ini menciptakan peluang bagi narasi sejarah yang sebelumnya terpinggirkan—termasuk sejarah perempuan, sejarah komunitas lokal, dan narasi kelompok minoritas—untuk mencapai visibilitas dan audiens yang sampai sekarang tidak dapat diakses melalui jalur penerbitan akademis tradisional. Dalam konteks pendidikan sejarah di Indonesia, Andiyasari dan Supriatna (2021) menegaskan bahwa literasi digital menjadi kompetensi kritis yang harus dikuasai oleh sejarawan maupun pendidik sejarah agar mampu beroperasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam ekosistem informasi digital yang terus berkembang pesat. Sementara itu, Hardi dan Patra (2023) dalam studi mereka di Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran sejarah berbasis digital di perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah kendala struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kesiapan pedagogis tenaga pengajar dalam mengintegrasikan sumber-sumber digital ke dalam praktik historiografi ilmiah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode deskriptif analitis. Kajian pustaka dipilih sebagai metode yang paling tepat karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kerangka pemahaman konseptual terkait fenomena historiografi digital dan sejarah publik, alih-alih menguji hipotesis empiris atau menganalisis kasus-kasus di lapangan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penulisan artikel konseptual di bidang humaniora, yang lebih menekankan pada kedalaman analisis teoritis dan kekompakan argumen.

Data dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya historiografi baik klasik maupun modern yang menjadi acuan utama dalam diskusi ilmu sejarah, termasuk tulisan-tulisan dari Mestika Zed, Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, Soedjatmoko, Taufik Abdullah, serta pemikir historiografi Barat seperti George Iggers dan Ernest Breisach. Sumber sekunder terdiri dari artikel-artikel jurnal akademik dan karya-karya analitis lainnya yang berkaitan dengan topik historiografi digital dan sejarah publik, dengan penekanan pada literatur mutakhir yang terbit dalam lima tahun terakhir, mencakup kajian-kajian dari Robertson dan Mullen (2021), Filene (2022), Getz (2023), Wieringa (2024), serta sejumlah penelitian dari konteks Indonesia seperti Andiyasari dan Supriatna (2021), Daftar dan Wibowo (2022), Mujib dan Subakti (2022), Hardi dan Patra (2023), Santhalia dan Nurdin (2023), Zuhdi dan Priyadi (2023), serta Putri dan Rahmat (2024).

Data dikumpulkan melalui pencarian pustaka yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Setelah pengumpulan, data tersebut dianalisis melalui tiga langkah: pertama, mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan dari setiap sumber; kedua, melakukan perbandingan dan sintesis berbagai sudut pandang untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan ketegangan konseptual; dan ketiga, mengembangkan argumen berdasarkan sintesis tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Kualitas kajian ini dijaga dengan menggunakan sumber-sumber yang memiliki otoritas di bidang historiografi, triangulasi perspektif dari berbagai tulisan, serta menjaga konsistensi argumen di seluruh artikel. Kekurangan dari pendekatan ini diakui, yaitu bahwa kajian konseptual tidak bisa menggantikan studi empiris tentang praktik riil historiografi digital di lapangan. Dengan demikian, artikel ini harus dilihat sebagai dasar teoritis yang perlu diikuti oleh penelitian empiris yang lebih terfokus di kemudian hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evolusi Historiografi menuju Era Digital

Peralihan dari zaman cetak ke zaman digital dalam penulisan sejarah dapat diamati melalui sejumlah dimensi utama. Pertama, dimensi produksi: jika pada era cetak menghasilkan teks sejarah memerlukan akses ke lembaga penerbitan, percetakan, dan institusi akademis yang membutuhkan dana dan legitimasi institusional yang besar, maka di era digital siapapun dengan koneksi internet dapat menciptakan konten sejarah tanpa banyak hambatan institusional. Kedua, dimensi penyebaran: penyebaran teks sejarah di zaman cetak terhambat oleh ruang fisik dan jaringan distribusi buku, sedangkan di era digital sebuah konten sejarah dapat mencapai jutaan pembaca dan penonton di seluruh dunia dalam beberapa jam. Ketiga, dimensi konsumsi: konsumen sejarah pada era cetak umumnya adalah pembaca yang mau meluangkan waktu untuk membaca teks panjang dan terstruktur, sementara konsumen sejarah di era digital adalah pengguna yang terbiasa dengan konten singkat, visual, dan interaktif.

Prospek yang disajikan historiografi digital untuk kemajuan ilmu sejarah di Indonesia memang cukup besar. Terutama, digitalisasi materi arsip dan dokumen sejarah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para peneliti di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang terletak di daerah terpencil yang jauh dari perpustakaan utama dan repositori arsip, ke sumber-sumber sejarah penting. Perkembangan ini berpotensi mendorong desentralisasi penyelidikan sejarah dan munculnya lembaga penelitian sejarah lokal yang sebelumnya telah terhambat oleh keterbatasan akses ke bahan sumber. Tammaro (2020) mencatat bahwa

perpustakaan dan arsip di era digital tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan pasif, melainkan berperan sebagai simpul aktif jaringan pengetahuan yang terbuka dan dapat diakses secara global. Sejalan dengan itu, Pratama dan Rahmat (2020) dalam kajian mereka tentang digitalisasi arsip sejarah lokal di Indonesia menegaskan bahwa upaya pelestarian memori kolektif secara digital memerlukan tidak hanya infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga komitmen institusional dan kebijakan yang mendukung keterbukaan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, modalitas inovatif narasi sejarah yang diaktifkan oleh teknologi digital—seperti dokumenter sejarah berbasis video, infografis interaktif, peta sejarah digital, game berorientasi sejarah, podcast sejarah, dan pengalaman realitas virtual imersif—memfasilitasi jalan untuk penyebaran pengetahuan sejarah yang secara signifikan lebih bernuansa dan mampu melibatkan beragam demografi pemirsa daripada teks akademis tradisional. Dalam hal ini, historiografi digital tidak hanya memperluas jangkauan demografis wacana sejarah tetapi juga meningkatkan modalitas di mana individu terlibat dengan dan memahami narasi sejarah mereka. Laksono (2021) dalam kajiannya tentang podcast sejarah di Indonesia mengungkapkan bahwa format audio digital ini telah berhasil menjangkau segmen audiens baru yang sebelumnya tidak terlibat dengan penulisan sejarah akademis, meskipun masih terdapat tantangan serius terkait akurasi dan kedalaman analisis historis. Lebih lanjut, Putri dan Rahmat (2024) meneliti fenomena konten kreator sejarah di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun mereka berhasil mempopulerkan sejarah kepada jutaan penonton, terdapat ketegangan yang nyata antara tuntutan popularisasi dan tanggung jawab epistemologis dalam penyajian narasi historis yang akurat.

Ketiga, platform digital membina komunitas sejarah yang memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai inkubator untuk menumbuhkan minat dan hasrat terhadap sejarah di kalangan generasi muda. Dalam konteks Indonesia, di mana kesadaran historis populasi yang lebih muda sering menjadi perhatian utama bagi para pendidik dan sejarawan, sejarah publik digital dapat berfungsi sebagai saluran yang kuat untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap penyelidikan sejarah.

Sejarah Publik dalam Ekosistem Digital

Sejarah publik sebagai konsep dan praktik nyata telah hadir jauh sebelum munculnya era digital. Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (1985) menegaskan bahwa sejarah pada dasarnya tidak pernah menjadi domain eksklusif akademisi—masyarakat telah terus-menerus mengembangkan metodologi mereka sendiri untuk melestarikan dan mentransmisikan memori kolektif. Tradisi lisan, ritual adat, artefak budaya, dan monumen sejarah mencontohkan bentuk-bentuk sejarah publik yang telah berkembang jauh sebelum pelembagaan ilmu sejarah. Apa yang membedakan sejarah publik era digital dari pendahulunya adalah besarnya, kecepatan, dan interaktivitasnya yang tak tertandingi. Daftar dan Wibowo (2022) dalam analisis konten sejarah di YouTube Indonesia menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi arena baru yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pemahaman historis masyarakat, di mana narasi yang disajikan oleh kreator konten non-akademis sering kali memperoleh jangkauan dan kepercayaan yang melampaui publikasi ilmiah. Breakell dan Fromm (2020) menambahkan dimensi kritis terkait pertanyaan kepemilikan dan representasi dalam arsip digital: siapa yang berhak mendefinisikan, mengkurasi, dan menginterpretasikan memori sejarah di ruang digital adalah pertanyaan yang sarat dengan implikasi politik dan epistemologis yang mendalam.

Abdurrachman Surjomihardjo (1979), dalam penelitiannya tentang tantangan pembangunan bangsa dan historiografi, menggarisbawahi bahwa sejarah melayani tujuan sosial

yang signifikan: tidak hanya mencakup dokumentasi masa lalu tetapi juga penanaman kesadaran kolektif yang membentuk landasan identitas nasional dan solidaritas. Dalam kerangka ini, sejarah publik dalam konteks era digital dapat dikonseptualisasikan sebagai perpanjangan dari peran sosial sejarah di tengah lingkungan yang semakin digital.

Syamdani (2001), dalam penelitiannya tentang kontroversi sejarah Indonesia, mengamati bahwa diskusi yang berkaitan dengan berbagai masalah sejarah di Indonesia sering dijiwai dengan bias politik dan ideologis yang dapat mengaburkan penilaian sejarah yang objektif. Dalam lanskap digital kontemporer, kecenderungan ini diperburuk oleh kerangka algoritmik platform media sosial, yang cenderung memperbesar konten yang kontroversial dan bermuatan emosional, serta oleh ekosistem informasi yang memfasilitasi penyebaran cepat ketidakakuratan sejarah, melampaui kapasitas komunitas akademik untuk memperbaikinya.

Tantangan Historiografi Digital

Tantangan yang harus diatasi sama-sama tangguh. Yang terpenting di antaranya adalah krisis seputar keaslian dan verifikasi sumber. Prinsip mendasar historiografi akademis terletak pada penerapan kritik sumber yang ketat: setiap pernyataan historis harus dapat dilacak ke sumber yang dapat diverifikasi dan dievaluasi untuk tingkat keandalannya. Dalam ekosistem digital yang ditandai dengan produksi konten historis oleh banyak aktor dengan latar belakang dan standar yang berbeda, penerapan standar yang ketat untuk kritik sumber menjadi sangat menantang. Narasi sejarah yang salah dapat dengan mudah beredar dan mencapai penerimaan luas sebelum diperbaiki oleh sejarawan yang berkualitas. Mujib dan Subakti (2022) menyebut fenomena ini sebagai krisis epistemologis historiografi digital, di mana batas antara fakta historis yang terverifikasi dan klaim yang tidak berdasar menjadi semakin kabur di era post-truth. Santhalia dan Nurdin (2023) dalam penelitian mereka tentang pola penyebaran misinformasi sejarah di media digital Indonesia menemukan bahwa konten sejarah yang keliru cenderung viral jauh lebih cepat daripada koreksi akademis, sehingga membutuhkan strategi respons yang lebih proaktif dari komunitas sejarawan profesional.

Tantangan kedua berkaitan dengan kedangkalan narasi sejarah. Keharusan komersial dan algoritmik platform digital sering memaksa pembuat konten untuk tertarik pada penyederhanaan yang berlebihan, sensasionalisme, dan mengabaikan nuansa dan kompleksitas. Kuntowijoyo (1994) berpendapat bahwa catatan sejarah yang efektif dicirikan oleh kapasitasnya untuk menjelaskan daripada hanya menceritakan. Kecakapan penjelasan ini mencakup kemampuan untuk menghubungkan peristiwa ke struktur yang lebih luas, menjelaskan hubungan sebab-akibat, dan mengontekstualisasikan dalam kerangka kerja yang luas—yang terbukti sangat menantang untuk dipertahankan dalam format konten digital yang cepat dan instan.

Tantangan ketiga melibatkan politisasi narasi sejarah dalam ranah digital. Iggers (1985) memperingatkan bahwa sejarah selalu rentan terhadap manipulasi demi keuntungan politik. Dalam lanskap digital kontemporer, kerentanan ini sangat diperburuk karena proses pembuatan dan penyebaran konten yang efisien, yang memberdayakan berbagai kelompok kepentingan dengan agenda politik yang beragam untuk membangun dan mengedarkan narasi sejarah yang selaras dengan tujuan mereka. Filene (2022) menyoroti ketegangan mendasar antara demokrasi digital yang membuka ruang partisipasi luas dengan kebutuhan akan akurasi historis yang menuntut keahlian dan verifikasi yang ketat; keduanya merupakan nilai yang sama-sama penting tetapi sering kali bertentangan dalam praktiknya. Getz (2023) lebih lanjut memperingatkan bahwa platform sejarah publik digital memiliki potensi besar untuk menjadi sarana disinformasi historis yang terorganisir, terutama ketika kelompok-kelompok dengan agenda ideologis tertentu secara

sistematis memproduksi dan menyebarkan narasi sejarah yang disesuaikan untuk mendukung klaim politik mereka di masa kini.

Mengingat peluang dan tantangan ini, Bambang Purwanto (2005) memberikan perspektif yang relevan: komunitas sejarawan akademik tidak boleh tetap dalam posisi defensif, mengisolasi diri dari dinamika berkembang yang terjadi di luar batas-batas lembaga akademik. Sebaliknya, sangat penting bagi mereka untuk mengembangkan strategi inovatif untuk keterlibatan aktif dan konstruktif dalam ekosistem sejarah publik digital, sambil menjunjung tinggi standar ilmiah yang ketat yang memberikan kepercayaan pada pekerjaan mereka. Wieringa (2024) menambahkan dimensi dekolonisasi dalam diskusi ini: historiografi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab khusus untuk memberi ruang bagi suara-suara dan perspektif yang selama ini terpinggirkan dalam tradisi historiografi yang didominasi narasi kolonial maupun nasionalis. Zuhdi dan Priyadi (2023) dalam refleksi mereka atas peran sejarawan di ruang publik digital menegaskan bahwa keterlibatan akademisi dalam ekosistem media digital bukan sekadar pilihan, melainkan telah menjadi tuntutan etis dan profesional di era ketika masyarakat semakin banyak memperoleh pemahaman historisnya dari sumber-sumber digital yang tidak selalu terkurasi secara ilmiah.

KESIMPULAN

Historiografi digital dan sejarah publik adalah dua aspek dari satu fenomena perubahan yang diciptakan oleh revolusi digital: adanya demokratisasi dalam pembuatan dan penggunaan sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam ukuran seperti ini sepanjang perjalanan penulisan sejarah. Perubahan ini memberikan peluang serta tantangan yang signifikan bagi kemajuan ilmu historiografi, terutama dalam lingkungan Indonesia.

Transformasi digital dalam historiografi menghadirkan peluang yang signifikan bagi perkembangan kajian sejarah kontemporer. Kehadiran media digital memungkinkan munculnya beragam perspektif historis yang lebih inklusif, memperluas upaya pelestarian memori kolektif, serta mendorong lahirnya bentuk-bentuk penyajian sejarah yang lebih inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, perkembangan ini turut mendukung proses desentralisasi produksi pengetahuan sejarah yang sebelumnya cenderung terfokus pada institusi atau kelompok tertentu.

Namun demikian, perkembangan historiografi digital juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kemudahan produksi dan distribusi informasi berpotensi meningkatkan penyebaran misinformasi sejarah yang sulit diverifikasi. Di samping itu, karakteristik media digital yang mengutamakan kecepatan dan keringkasan sering kali menyebabkan penyederhanaan analisis historis sehingga mengurangi kedalaman kajian. Tidak kalah penting, ruang digital juga rentan dimanfaatkan sebagai sarana politisasi sejarah yang dapat memengaruhi objektivitas pemahaman masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunitas sejarawan akademik perlu merespons perkembangan historiografi digital melalui keterlibatan yang aktif, reflektif, dan kritis. Pendekatan yang tepat bukanlah menolak ataupun mengabaikan fenomena tersebut, melainkan berpartisipasi secara konstruktif dalam ekosistem sejarah publik digital. Para sejarawan dituntut untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip keilmuan yang ketat sekaligus mengadaptasikan penyampaian pengetahuan sejarah ke dalam format dan bahasa yang lebih komunikatif serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui strategi tersebut, historiografi digital berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran sejarah masyarakat yang lebih kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat diperlukan guna mengkaji berbagai praktik sejarah publik digital di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap pembentukan pemahaman historis dan budaya literasi sejarah di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah Historiografi, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang, selaku koordinator, atas bimbingan dan diskusi-diskusi ilmiah yang memperkaya pemahaman penulis tentang dinamika perkembangan historiografi. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T., & Surjomihardjo, A. (Eds.). (1985). Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia.

Alfian, T. I., et al. (Eds.). (1987). Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Andiyasari, A., & Supriatna, N. (2021). Literasi digital dalam pembelajaran sejarah: Tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0. Jurnal Pendidikan Sejarah, 10(2), 112–128. https://doi.org/10.21009/JPS.102.02

Breakell, S., & Fromm, A. (2020). The digital archive: Whose memory, whose history? Museum Management and Curatorship, 35(4), 343–357. https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1772573

Breisach, E. (1983). Historiography: Ancient, Medieval & Modern. Chicago: The University of Chicago Press.

Daftar, R., & Wibowo, A. (2022). Media sosial sebagai ruang baru sejarah publik: Analisis konten sejarah di YouTube Indonesia. Jurnal Sejarah dan Budaya, 16(1), 45–62. https://doi.org/10.17977/um020v16i12022p045

Dougherty, J., & Nawrotzki, K. (Eds.). (2013). Writing History in the Digital Age. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Filene, B. (2022). Navigating the tension between digital democracy and historical accuracy in public history. The Public Historian, 44(2), 83–101. https://doi.org/10.1525/tph.2022.44.2.83

Getz, T. R. (2023). Public history, digital platforms, and the challenge of historical misinformation. Journal of American History, 110(1), 22–40. https://doi.org/10.1093/jahist/jaad012

Hardi, E., & Patra, H. (2023). Transformasi pembelajaran sejarah berbasis digital di perguruan tinggi: Studi kasus Universitas Negeri Padang. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6(2), 101–116. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52411

Iggers, G. (1985). New Directions in European Historiography. London: Methuen.

Kartodirdjo, S. (1982). Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.

Kuntowijoyo. (1994). Penulisan sejarah Indonesia. Dalam Metodologi Sejarah (hlm. 1-30). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Laksono, D. (2021). Podcast sejarah sebagai medium sejarah publik di Indonesia: Potensi dan problematika. Jurnal Ilmu Sejarah, 6(1), 23–38. https://doi.org/10.24257/jis.v6i1.1287

Mestika Zed. (2001). Pengantar Studi Historiografi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Mujib, A., & Subakti, H. (2022). Historiografi digital dan tantangan verifikasi sumber di era post-truth. Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 8(1), 14–29. https://doi.org/10.31851/kalpataru.v8i1.7341

Nora, P., & Kritzman, L. D. (Eds.). (1996). Realms of Memory: Rethinking the French Past. New York: Columbia University Press.

Pratama, R. A., & Kurniawan, H. (2020). Digitalisasi arsip sejarah lokal sebagai upaya pelestarian memori kolektif masyarakat Indonesia. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 13(2), 76–91. https://doi.org/10.22146/khazanah.55387

Purwanto, B., et al. (2005). Menggugat Historiografi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Putri, N. E., & Rahmat, A. (2024). Konten kreator sejarah di Indonesia: Antara popularisasi dan tantangan epistemologis. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 9(1), 55–70. https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.3892

Robertson, S., & Mullen, L. (2021). Searching for the history of digital history. Digital Humanities Quarterly, 15(1). Retrieved from http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/15/1/000548/000548.html

Santhalia, P. W., & Nurdin, M. (2023). Misinformasi sejarah di media digital Indonesia: Pola penyebaran dan strategi koreksi akademik. Jurnal Komunikasi Indonesia, 12(1), 33–48. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.12834

Soedjatmoko, et al. (1995). Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar [terjemahan]. Jakarta: Gramedia.

Surjomihardjo, A. (1979). Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi. Jakarta: Yayasan Idayu.

Syamdani (Ed.). (2001). Kontroversi Sejarah Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Tammaro, A. M. (2020). Libraries and archives in the digital age: New models of preservation and access. JLIS.it: Italian Journal of Library and Information Science, 11(3), 1–16. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12639

Wieringa, E. (2024). Decolonizing digital history: Indigenous voices and online historical narratives in Southeast Asia. International Journal of Digital History, 2(1), 11–27. https://doi.org/10.1515/ijdh-2024-0002

Zuhdi, S., & Priyadi, S. (2023). Sejarawan dan ruang publik digital: Refleksi atas tanggung jawab akademik di era media sosial. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 25(2), 189–206. https://doi.org/10.14203/jmb.v25i2.1352